

LEMBAR EVALUASI APBDes/PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH  
 KECAMATAN : PRAYA BARAT  
 DESA : PEMUDAK

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap	✓	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes dilakukan tepat waktu	✓	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes	✓	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas					

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes Perubahan APBDes				
2.1 Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes Tentang APBDes Perubahan APBDes dibuat berdasarkan RKPDes RKPDes Perubahan tahun berkenaan	✓	-	RKPDes atau RKPDes Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan Umum				
-				
2.2 Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan rasional dan realistis	✓	-	
2.2.2	Apakah Estimasi Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓	-	Peraturan Desa terkait PADes (Perdes tentang Pungutan)
2.2.3	Apakah Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓	-	Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan pada tahun sebelumnya
Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pendapatan				
-				

23	Bejana			
23.1	Apakah Penempatan pos Bejana telah sesuai dengan peraturan Perancang Anggaran	✓	1	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
23.2	Samudra kegiatan Bejana telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓	1	
23.3	Apakah ada program kegiatan yang diberikan oleh cam (Suk) atau perangkat (Tukubaya)	✓	1	
23.4	Apakah kegiatan Desa yang diberikan sesuai dengan bidang atau kegiatan yang ada di Desa dan Peringkat	✓	1	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kadudukan Keuangan Pemerintah Desa dan PPD
23.5	Apakah kegiatan Desa yang diberikan sesuai dengan bidang atau kegiatan yang ada di Desa dan Peringkat	✓	1	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kadudukan Keuangan Pemerintah Desa dan PPD
23.6	Apakah kegiatan Desa yang diberikan sesuai dengan bidang atau kegiatan yang ada di Desa dan Peringkat	✓	1	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kadudukan Keuangan Pemerintah Desa dan PPD
23.7	Apakah kegiatan Desa yang diberikan sesuai dengan bidang atau kegiatan yang ada di Desa dan Peringkat	✓	1	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kadudukan Keuangan Pemerintah Desa dan PPD
23.8	Apakah kegiatan Desa yang diberikan sesuai dengan bidang atau kegiatan yang ada di Desa dan Peringkat	✓	1	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kadudukan Keuangan Pemerintah Desa dan PPD

2.4	Pembayaran			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembayaran telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	✓	-	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembayaran untuk pembentukan Dana Cadangan	X	✓	
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembayaran untuk Penyertaan modal pada BUMDes	-	✓	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan/atau hasil uji kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDes, pada pos penentuan pembayaran terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDes, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-	✓	

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembayaran  
 Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

Silpa Rp 16.552.387,03

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

No	Jabatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
1. ...	Kasir		
2. ...	Sekretaris		
3. ...	Anggota		
4. ...	Anggota		
5. ...	Anggota		
6. ...	Anggota		
7. ...	Anggota		
8. ...	Anggota		



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN PRAYA BARAT

Jln. Raya Penujak-Selong Belanak Kode Pos : 83572

## DAFTAR HADIR PELAKSANAAN EVALUASI RAPBDes DESA PENUJAK DAN BANYU URIP TIM EVALUASI KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Hari/Tanggal : ..... Januari 2025

Tempat : Kantor Camat Praya Barat

No.	Nama	Alamat	Jabatan	TandaTangan
1.	H. LALU SAMSUL RIJAL, S. IP	Mangkung	Ketua Tim Evaluasi	1.
2.	LALE MAHMUDAH, SE	Banujai	Sekretaris	2.
3.	L. JUNAI, S. Ag	Darek	Anggota	3.
4.	WAYAN ADIWIRATMAJA	Mataram	Anggota	4.
5.	SURATA, S. IP	Praya	Anggota	5.
6.	I KETUT NITISAstra, S. Sos	Praya	Anggota	6.
7.	SLAMET RIADI	Bonder	Anggota	7.
8.	ENDANG SUSILAWATI	Penujak	Anggota	8.
9.	LALU ABDI UTAMA SARI	penujak.	sekdes Penujak.	9.
10.	MANCYUR.	penujak	Kaur. Perencanaan	10.
11.	SAHIRMAN.	Penujak.	Kasi Kerra.	11.
12.	MUHAMAD SAMIAN	BANYU URIP	SEKDES B. URIP	12.
13.	MIATIM	BANYU URIP	Kaur KAWANAN	13.
14.	LAW ALIMUDIN	BANYU URIP	KASI KESPA	14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN PRAYA BARAT  
H. LALE SAMSUL RIJAL, S. IP  
NIP. 197212312002121034

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA  
 PEMERINTAH DESA KATENG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

STATUS APBDES : DRAFT AWAL


Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	1.133.397.240,00	1.043.700.000,00	92,09	89.697.240,00	7,91
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.565.700,00	10.789.000,00	1,92	549.776.700,00	98,08
5.3.	Belanja Modal	1.231.907.810,22	0,00	0,00	1.231.907.810,22	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.540.000,00	0,00	0,00	86.540.000,00	100,00
Jumlah		3.012.410.750,22	1.054.489.000,00	35,00	1.957.921.750,22	65,00


batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa


Komposisi Belanja Operasional 35,00 %

Komposisi Belanja Non Operasional 65,00 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf :   
 Nama : WAYAN ADIWIRATMAJA  
 NIP : 196810291989031005

Paraf :   
 Nama : LALE MAHMUDAH, SE  
 NIP : 197202012001122005

Paraf :   
 Nama : L. LUNASBI  
 NIP : 197392312009014096

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :



LEMBAR EVALUASI APBDes/PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH  
 KECAMATAN : PRAYA BARAT  
 DESA : KATEPILG

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap	✓	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes dilakukan tepat waktu	✓	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes (Lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati berssama, Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBdes harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBdes/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes	✓	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas					
-					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/Perubahan APBdes				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes Tentang APBDes/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDes/RKPDes Perubahan tahun berkenaan	✓	-	RKPDes atau RKPDes Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan Umum					
-					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan rasional dan realistis	✓	-		
2.2.2	Apakah Estimasi Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓	-	Peraturan Desa terkait PADes (Perdes tentang Pungutan)	
2.2.3	Apakah Estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓	-	Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pendapatan					
-					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓	-		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (Satu) tahun anggaran (multi years)	-	✓		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tunjangan dan Operasional BPD	✓	-	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.5	Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Buati	✓	-	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓	-	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan Output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	✓	-		Peraturan tentang Dana Desa
2.3.8	Penggunaan Dana Desa Masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan tekhnisnya	-	✓		

Kesimpulan Penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	✓	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	✓		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan modal pada BUMDes	-	✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan/atau hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDes, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓	-		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDes, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-	✓		

Kesimpulan penilaian Struktural APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan  
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

Silpa Rp 7.718.063,75,-

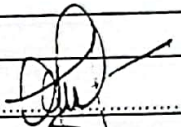


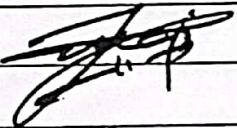
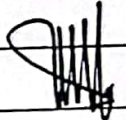
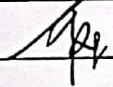
Evaluasi dilakukan tanggal

: ..... 2025

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai)

. Untuk Disetujui Bupati

. Untuk Diperbaiki Desa

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. H. LALU SAMSUL RIJAL, S. IP	Ketua Tim Evalua	1. 	
2. LALE MAHMUDAH, SE	Sekretaris		2. 
3. LALU JUNAIDI, S. Ag	Anggota	3. ....	
4. WAYAN ADIWIRATMAJA	Anggota		4. 
5. SURATA, S. IP	Anggota	5. 	
6. I KETUT NITI SASTRA, S. Sos	Anggota		6. 
7. SLAMET RIADI	Anggota	7. 	
8. ENDANG SUSILAWATI	Anggota		8. 